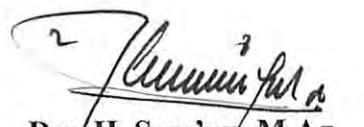


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fajrul Islam Attsa'uri** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

BAB V : PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pasca kematian Nabi tantangan pertama dan yang paling mendasar adalah memecahkan pertanyaan: apakah umat Islam hendaknya membentuk satu pemerintahan tunggal dibawah satu pimpinan, atau apakah mereka mesti menjadi masyarakat yang terpisah, masing-masing dipimpin oleh pemimpin politiknya sendiri? Pada akhirnya umat Islam memilih untuk memelihara masyarakat tunggal dan memilih mertua sekaligus pengikut setia Nabi, Abu Bakar untuk menjadi pengganti pertama. Abu Bakar dan pengganti selanjutnya, dalam tradisi Islam dikenal sebagai khalifah (*al-Khulafa al-Rasyidin*).⁸ Dari sini menunjukkan bahwa tradisi kekuasaan Islam menunjukkan politik sebagai unsur penting dalam perkembangan dakwah dan masyarakat Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, fenomena hubungan agama dan negara dalam kenyataan sejarah sering menampilkan kesenjangan dan pertentangan. Hal ini bersumber pada dua faktor yaitu : faktor internal, *pertama*, adanya perbedaan konseptual antara agama dan politik yang menimbulkan kesukaran pemanduan dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya keterangan yang jelas dan rinci dalam sumber-sumber Islam. *Kedua*, adanya penyimpangan praktik politik dari etika dan moralitas agama.⁹

Faktor eksternal yaitu, ekspansi imperialisme dan kolonialisme Eropa ke dunia Islam. *Pertama*, adalah menciptakan disintegrasi politik *Islamdom*, yaitu

⁸ John L Esposito (ed), *Islam : Kekuasaan Pemerintah , Doktrin dan Realitas Sosial*, (Jakarta: Insiasi Press, Cet. I, 2004), h. 19

⁹ Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, h.



menyangkut konsep dan sistem politik negara.¹⁰ *Kedua*, yaitu, menyebabkan warisan kebudayaan “asli” dunia ketiga (Islam), baik menyangkut nilai-nilai moral maupun nilai-nilai estetika yang selalu menetapkan etos dan paham kosmologis tertentu yang khas semakin terkikis.¹¹ Respon para penguasa dan pemikir muslim terhadap realitas tersebut cukup beragam.

Ada tiga bentuk respon kaum muslim terhadap kolonialisme/modernisme Barat. Menolak, sekularisme dan westernisasi, serta modernisasi Islam.¹² Yang pada gilirannya menyebabkan polarisasi pandangan ulama/pemikir politik tentang hubungan agama dan negara. Karenanya, konsepsi pemikir Islam tentang negara tidak luput dari dimensi kultural dan politis. Yang pertama mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat ia dikembangkan, sementara yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam suatu konstelasi politik tertentu.¹³

Dalam pemikiran politik Islam paling tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Paradigma *pertama*, berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna (*Kaffah*) dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk bernegara. Karena itulah

¹⁰ *Ibid*, h. 56

¹¹ M. Deden Ridwan, Kata Pengantar untuk buku *Melawan Hegemoni Barat : Ali Syari'ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Lentera, Cet. I, 1999), h. 6

¹² John L Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996), h. 65

¹³ Din Syamsudin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, h.

dipelajari. Dan hal inilah yang melandasi penulis untuk mengangkat penelitian tentang pemikiran Ali Syari'ati.

Ali Syari'ati adalah sosok figur yang mewakili kegelisahan dunia ketiga (Islam), Ali Syari'ati cemas ketika menyaksikan tercerabutnya masyarakat Islam dari kearifan dan nilai luhur mereka. Ia mencoba untuk mendobrak kebekuan yang melanda masyarakat dan bangsanya (Revolusi Iran 1979). Ali Syari'ati telah membuktikan kepada dunia bahwa Islam tidaklah reaksioner, pasif, dan *status quo*. Islam mampu menggerakkan manusia untuk melawan berhala-berhala peradaban (Revolusi Iran 1979). Lebih dari itu, Ali Syari'ati adalah sosok intelektual muslim yang spektrum pemikirannya telah melintas batas-batas geografis dan waktu. Ketokohaannya telah membuktikan bahwa dirinya adalah cermin *Raushanfikir*, sosok manusia ideal yang menjadi cita-citanya. yang memang progresif dan revolusioner.

Dari beberapa dasar dan alasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul **Pandangan Ali Syari'ati tentang *Raushanfikir* dalam Revolusi Islam Iran (Studi Relasi Islam dan Politik)** hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsep *Raushanfikir* yang beliau cetuskan, pengaruh dan posisinya dalam revolusi Islam, serta untuk mengidentifikasi dalam tipologi apa seorang Ali Syari'ati dalam konteks relasi Islam dan politik.

sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang uraian teori relasi agama dan negara yang terpetakan dalam tiga paradigma utama, yakni *pertama*, paradigma integralistik, *kedua*, paradigma simbiotik, dan *ketiga*, paradigma sekuleristik.

BAB III, berisi pembahasan setting sosial-politik, biografi yang berisi keluarga, masa kanak-kanak, dan remaja, aktivitas politik, pergulatan intelektual: upaya pencarian identitas diri, kembali ke negri asal, hijrah dan kematian, karya-karya intelektual, dan pemikiran Ali Syari'ati tentang Islam Syi'ah sebagai ideologi revolusioner, *Ummah* sebagai masyarakat ideal, revolusi sebagai jalan pembebasan, dan *Raushanfikh* sebagai agen revolusi.

BAB IV, berisi analisis pandangan Ali Syariati tentang *Raushanfikh* dalam konteks relasi Islam dan politik. Serta analisa kontribusi pandangan Ali Syariati tentang Raushanfikh terhadap Revolusi Islam Iran

BAB V, merupakan bab terakhir atau penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

RELASI ISLAM DAN NEGARA

Di zaman modern, perdebatan tentang relasi agama dan negara terus menjadi wacana yang menarik. Pengalaman masyarakat muslim di sejumlah negara menunjukkan terdapatnya hubungan yang canggung antara Islam dan negara. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan konsep dan kultur masyarakat muslim.

Jika melihat sejarah Islam, sesungguhnya perdebatan tentang relasi Islam dan negara sudah berlangsung di antara para pemikir politik Islam. Perbedaan pandangan ulama politik tentang hubungan agama dan negara dapat dikatakan disebabkan oleh tidak terdapatnya keterangan yang jelas dan rinci dalam sumber-sumber Islam. Pandangan ulama/pemikir politik tentang hubungan agama dan negara, pada gilirannya mempunyai corak konsepsi mereka tentang negara itu sendiri.

Karenanya, konsepsi pemikir Islam tentang negara tidak luput dari dimensi kultural dan politis. Yang pertama mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat ia dikembangkan,

diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*) karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan.²

Kenapa agama dan negara disatukan? Islam sebagai agama yang turun dari langit dalam prakteknya selalu saja mudah dimanfaatkan oleh pemeluknya demi tujuan politik. Akibat nafsu besar mendapatkan justifikasi dari agama, maka perilaku politik apa pun dijalankan mesti dilabelkan dengan perjuangan agama. Oleh karena itulah, dalam sejarah modern, Islam harus disatukan dengan politik. Islam adalah agama sekaligus negara atau politik (*din wa daulah*).³

Kebanyakan umat Islam meyakini pandangan integralistik ini sebagai paradigma politik Islam yang ideal. Artinya, Islam tidak membedakan antara agama dan politik. Oleh karena Islam sebagai agama sudah lengkap dan sempurna (*kaffah*), maka Islam mengurus semua kehidupan umat manusia, termasuk urusan politik. Manfaat yang dapat diperoleh dari konsep tak terpisahkannya agama dan politik adalah syariah dapat diberlakukan secara efektif sebagai hukum negara dan komunitas muslim mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Pandangan penyatuan agama dan politik seperti ini didasarkan pada pernyataan al-Qur'an.⁴ Diantaranya mengenai perlunya

² Munjar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 76

³ *Ibid*, h. 79

⁴ Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacanan Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I, 1998), h. 55

(khususnya SAVAK), dan ketergantungan pada barat terutama dukungan politik militer AS.¹¹

B. Biografi Ali Syari'ati

1. Keluarga, Masa Kanak-Kanak dan Remaja

Ali Syari'ati¹² anak pertama dari Muhammad Taqi dan Zahra, dilahirkan pada tanggal 24 November 1933 di sebuah desa kecil di Kahak. Dia merupakan anak pertama sekaligus anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga, dengan tiga orang saudara perempuannya, Tehereh, Tayebeh, dan Batul (Afsaneh). Ali Syari'ati dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana, dan tumbuh dengan dibekali pengertian bahwa moralitas dan etika adalah nilai-nilai yang mengangkat status dan kehormatan sosialnya, bukan uang.¹³ Dalam keluarga ini ritual keagamaan ditunaikan dengan seksama. Islam dalam pandangan keluarga ini adalah doktrin sosial dan filsafat yang relevan dengan zaman modern, dari pada sebagai keyakinan masa lalu yang bersifat pribadi dan hanya memikirkan dirinya sendiri.¹⁴

Pada musim semi tahun 1941, sebulan setelah sekutu menginvasi Iran, Ali Syari'ati memasuki tahun pertama di sekolah dasar swasta Ibnu Yamin. Di

¹¹ Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, h. 113-144

¹² Nama asli Ali Syari'ati adalah Muhammad Ali Mazinan, kemudian ia mengganti namanya menjadi Ali Syari'ati ketika akan meninggalkan Iran (16 Mei 1977) untuk pergi ke London. Lihat Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, Cet. II, 1996), h. 239

¹³ Ali Rahnama, *Ali Syari'ati: Biografi Politik Intelektual Revolusioner*, h. 55

¹⁴ Anjar Nugroho, *Ali Syari'ati dan Pemikirannya: Islam Progresif-Revolusioner dalam Suara Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Pres Suara Muhammadiyah, no 19, 2007), h. 29

mahluk manusia keseluruhan (*rahmatan lil alamin*).⁵² Analisis sejarah Islam juga menunjukkan bahwa Islam sendiri muncul sebagai agama revolusioner dan sejak itu pula telah bekerja sebagai gerakan revolusioner yang berkesinambungan.⁵³

Kata kunci progresifitas Islam adalah peran aktif dalam sejarah kemanusiaan. Islam bukan agama pasrah yang hanya berfikir tentang kehidupan akhirat dan tidak melibatkan diri dalam dinamika sejarah sosial-politik manusia. Agama pasrah ini adalah agama candu yang akan melanggengkan segala bentuk kesewenang-wenangan dan penindasan. Dalam posisi ini, kata Marx, mereka yang tertindas akan dihibur oleh ajaran yang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah takdir Tuhan dan pahala mereka adalah surga.⁵⁴

Dalam pandangan Kuntowijoyo, Islam yang dipahami sebagai ajaran sosial, dapat dinyatakan bahwa Islam sangat revolusioner karena selalu menghendaki transformasi sosial. Islam selalu berupaya merombak struktur-struktur ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Islam yang melakukan transformasi dalam kerangka menciptakan struktur baru yang lebih adil.⁵⁵

Seperti halnya Syari'ati, Islam menurutnya bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hubungan individual dengan

⁵² Muhammad Nafis, dari *Cengkraman Penjara Ego Memburu Revolusi: Memahami Kemelut Tokoh Pemberontak*, dalam M Deden Ridwan (ed), *Melawan Hegemoni Barat: Ali Syari'ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*, h. 96-97

⁵³ A. Ezzati, *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, Cet. I, 1990), h. 11

⁵⁴ Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, (Yogyakarta: CV Qalam, Cet. I, 2004), h. 243

⁵⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk aksi*, (Bandung: Mizan, Cet. V, 1993), h. 302

mendefinisikan cita-cita dan tujuan bersamanya, dan akhirnya yang ikut serta dalam menggerakkan dan mendidik masyarakatnya yang statis dan bodoh. Dengan kata lain, orang yang tercerahkan masa modern harus melanjutkan langkah yang telah dirintis oleh para Nabi. Tugasnya adalah menuntun dan bekerja demi keadilan, bahasanya sesuai dengan zamannya, dan solusi-solusi yang diajukan sejalan dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya.¹³⁶

Ali Syari'ati secara tegas menyatakan bahwa orang yang tercerahkan (*Raushanfikir*) itulah yang harus memulai langkah-langkah dan memprakarsai gerakan revolusioner untuk merombak stagnasi, sebagaimana rasul-rasul selalu muncul untuk mengubah sejarah dan menciptakan sejarah baru. *Raushanfikir* adalah model manusia yang diidealkan oleh Syari'ati untuk memimpin masyarakat menuju revolusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Chandelle, orang tercerahkanlah yang melanjutkan misi kenabian dalam sejarah. Orang tercerahkan adalah individu yang sabar, yang diutus dengan suatu misi di kalangan rakyat untuk memandu mereka menuju tujuan, kebebasan, dan kesempurnaan manusiawi, dan menyelamatkan mereka dari kebodohan, kemusyrikan, dan penindasan, bersikap sosial, berada di tengah rakyat dan merasa bertanggung jawab atas nasib rakyat yang diperbudak dan ditindas adalah karakteristik hakiki sifat tercerahkan. Orang

¹³⁶ *Ibid*, h. 45

itu akan mengeluarkan energi yang sangat besar dan memungkinkan seorang muslim tercerahkan untuk:

1. Menyaring dan menyuling sumber-sumber daya masyarakatnya dan mengubah penyebab kebobrokan dan kemandekan menjadi kekuatan atau gerakan.
2. Mengubah konflik antar kelas dan sosial yang ada menjadi suatu kesadaran akan tanggung jawab sosial, yaitu dengan cara pemanfaatan kekuatan kesenian, menulis dan berbicara, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang ada.
3. Menjembatani kesenjangan antara orang-orang yang tercerahkan dengan rakyat jelata, dengan menjalin hubungan kekeluargaan dan pemahaman diantara mereka, dengan demikian menempatkan agama untuk membangkitkan dan melahirkan gerakan untuk kepentingan rakyat.
4. Mencegah agama dari orang-orang yang menjadikan agama untuk tujuan-tujuan pribadi
5. Mendorong kebangkitan agama yang hidup, dinamis, kuat dan adil. Melumpuhkan agen-agen reaksioner dalam masyarakat sekaligus menyelamatkan rakyat dari unsur-unsur yang membius mereka.
6. Dan akhirnya menghilangkan semangat peniruan dan kepatuhan yang merupakan ciri agama biasa, dan menggantinya dengan semangat ijtihad

yang kritis, revolusioner. Semua ini dapat dicapai melalui gerakan pembaruan agama yang akan mencerahkan zaman.¹⁴⁰

Syari'ati menegaskan, bahwa para pemikir tercerahkan adalah aktivis radikal yang menyakini sungguh-sungguh dalam ideologi mereka dan menginginkan syahid demi perjuangan tersebut. Misi yang dilancarkan mereka adalah untuk memandu “massa yang tidur dan bebal” dengan mengidentifikasi masalah riil berupa kemunduran masyarakat, dan Islam agama keadilan sebagai solusi rasional untuk membedah masalah yang mencuat dalam masyarakat.

Bagi Syari'ati, *Raushanfikr* adalah kunci pemikirannya karena tidak ada harapan untuk perubahan tanpa peran mereka. Merekalah pembangun jalinan yang meninggalkan isolasi menara gading dan turun dalam masyarakat. Mereka adalah katalis yang meradikalisasi massa yang tidur panjang menuju revolusi melawan penindas. Hanya ketika dikatalisasi oleh *Raushanfikr* masyarakat dapat mencapai lompatan kreatif yang besar menuju peradaban baru.

Semangat *Raushanfikr* Ali Syari'ati yang *open mind* dan berkelana mencari kebenaran dari tempat mana pun sungguh sebuah semangat yang harus ditiru. Tanpa harus menjadi *totally liberal* (misalnya dengan meninggalkan Tauhid), Syari'ati telah menjadikan agama menjadi kontekstual pada zamannya dan berusaha menjadi agama sebagai jawaban atas keperluan rakyat dan zamannya.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 52-53

negara. Ali Syari'ati tidak setuju dengan peranan yang terlalu besar dari para *mujtahid* (ulama). Bagi Syari'ati, mereka yang bukan ulama bisa jadi dapat memahami ajaran Islam dengan lebih baik; berfikir dan hidup dengan cara Islami yang lebih murni, dibanding ahli hukum atau filosof.

Penolakan Ali Syari'ati terhadap model *Imamah* yang konvensional lebih banyak disebabkan kekhawatiran Syari'ati terhadap model tersebut yang pada gilirannya akan membentuk sebuah negara agama formalistik. Ali Syari'ati tidak setuju dengan bentuk negara teokrasi dengan ulama sebagai pemegang otoritas kekuasaan. Karena hal tersebut akan menyebabkan depotisme spiritual. Inilah depotisme yang terburuk.

Ali Syari'ati menemukan dalam konteks Iran, model seperti itu, agama (Islam) hanya akan menjadi ideologi mapan yang cenderung dimanipulasi, dipahami, dan disikapi secara instrumental untuk kepentingan politik sempit. Lebih jauh kekuasaan sulit dikontrol, dan partisipasi politik rakyat menjadi sangat rendah. Tidak dielakkan Syi'ah yang melembagakan agama negara yang disajikan sebagai sebuah alat untuk menjamin penaklukan masyarakat politik.

Meskipun Syari'ati dengan keras mengkritisi habis-habisan model *imamah* pada umumnya yang menjurus pada teokrasi, akan tetapi Syari'ati juga tidak setuju dengan pemisahan urusan negara atau politik dengan agama, karena bagi Syari'ati dalam ajaran Islam tidak dikenal pemisahan urusan negara atau politik dengan agama.

Ketidaksetujuan tersebut dapat dilihat konsep gagasan Syari'ati yang berusaha menjadikan proyek ideologisasi Islam sebagai jalan keluar mengatasi problem masyarakat. Menurutnya kegagalan masyarakat barat adalah karena meninggalkan nilai-nilai sepiritual. Salah satu usahanya ialah menjadikan tauhid sebagai pandangan dunia. Pandangan ini memandang jagad raya sebagai sebuah organisme hidup tanpa dikotomisasi, semua adalah kesatuan dalam trinitas antara tiga hipotesis: Tuhan, manusia, dan alam. Implikasi logis dari pandangan dunia tauhid dalam ranah sosial mengandung pengertian kesatuan masyarakat, masyarakat tanpa kelas, tidak ada pembedaan kaya dan miskin, dan persamaan manusia di hadapan Tuhan.

Sehingga dapat dimengerti jika kemudian Syari'ati tidak sepakat dengan model negara teokrasi yang menempatkan ulama sebagai pemegang paling abash otoritas politik dan agama. Lebih jauh menganggap ulama sebagai orang yang *ma'sum* adalah sangat ceroboh. Bagi Syari'ati model seperti ini justru bertentangan dengan tauhid sebagai pandangan dunia. Karena membuat segelintir orang untuk memperoleh monopoli kebenaran di segala lini kehidupan, dominasi, belenggu dan kenistaan oleh manusia atas manusia, padahal semua sama dihadapan Tuhan. Sebaliknya menekankan kepada umat untuk berlaku taqlid kepada ulama. Justru menurut Syari'ati, model teokrasi seperti ini pada dasarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena dalam sistem teokrasi terjadi diskriminasi manusia atas dasar ras, kelas, darah, kekayaan, kekuatan dan lainnya dianggap berlawanan dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Selanjutnya, dalam *Ummah* kita akan menemukan konsistensi pemikiran Syari'ati dengan semangatnya untuk menjadikan Islam (tauhid) sebagai pandangan hidup komprehensif (Islam sebagai ideologi). Yakni, tauhid yang telah diderivasikan dalam bentuk *Ummah* mengandung pengertian kesatuan masyarakat, masyarakat tanpa kelas, tidak ada pembedaan kaya dan miskin, dan persamaan manusia di hadapan Tuhan ditandai dengan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dengan diktum tersebut, dapat dilihat konsepsi Syari'ati tentang masyarakat ideal juga dipengaruhi marxisme.

Hamid Enayat² menyebut model masyarakat Islam ideal yang di impikan Syari'ati dapat dikatakan sebagai sosialisme Islam radikal. Sosialisme ini berupaya menyuguhkan Islam secara lebih perkasa untuk mengatasi berbagai kemelut negara dunia ketiga yang *nota bene* mayoritas negara muslim. Dalam konteks ini, upaya merujuk antara Islam dengan marxisme sebagai doktrin sosialisme yang paling berpengaruh dilakukan. Logika-logika marxis digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkonstruksi ulang interpretasi atas Islam. Terminologi Qur'an didesakralisasikan, pada saat yang sama dimasukkannya pemahaman ilmiah, bahkan sinkretisasi dengan khazanah barat, untuk tuntutan menggugah kesadaran. Dengan demikian Islam tampil seolah-olah seperti wajah marxisme yang saleh.

² Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 2001), h 121-127

selama masa ghaibnya Imam Mahdi yang berhak memimpin adalah intelektual tercerahkan (*raushanfikir*). Pemimpin umat harus dipilih oleh kelompok ini dan tidak harus patuh kepada ulama. Ia berpendapat hanya kaum intelegensia yang mampu mengatasi kemelut menuju perubahan kearah kebebasan dan keadilan.

Keyakinan terhadap begitu besarnya peran intelektual dalam ranah sosial politik juga dapat ditemukan dalam pemikiran Edward W. Said. Ia menyatakan, seorang intelektual tidaklah berada di menara gading. Sebaliknya, mereka terlibat langsung dalam soal-soal kemasyarakatan. Cendekiawan itu, menurut Said, tidak bebas nilai atau netral. Sebaiknya seorang intelektual harus berpihak yakni terhadap kelompok lemah yang tertindas.⁸

Sementara itu, Michel Foucault, lewat karyanya *Power/Knowledge*, membahas secara khusus relasi antara intelektual dan kekuasaan. Menurut Foucault apa yang disebut intelektual saat ini adalah dalam makna politis dan bukan sosiologis, dengan kata lain, orang-orang yang memanfaatkan pengetahuan, kompetensi, dan relasinya dengan kebenaran dalam lapangan-lapangan perjuangan politis.⁹ Karena itu sesungguhnya bagi Foucault intelektual itu terkait dengan relasi sebagai produksi kebenaran dan kekuasaan. Sehingga

⁸ Lebih lanjut mengenai peran yang harus diemban intelektual lihat Edward W. Said, *Peran Intelektual*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998)

⁹ Micheal Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan Wacana Pilihan dan Tulisan - Tulisan Lain 1972-1977*, (Yogyakarta: Bebtang Budaya, Cet I, 2002), h. 159

konsepsinya tentang Ummah; yakni dari pandangan tauhid ke ideologi kemudian pada akhirnya diderivasikan untuk membentuk masyarakat Islam ideal yang sedikit banyak juga dipengaruhi sosialisme marxis.

Selanjutnya, ketidakjelasan masalah suksesi kepemimpinan sebagai sesuatu yang penting dalam pemerintahan tidak secara jelas disebut dalam Islam. Oleh sebab itu Ali Syari'ati melihat model suksesi apapun diperbolehkan. Dalam hal ini ia lebih cenderung suksesi kepemimpinan diselenggarakan secara syura atau musyawarah (demokrasi) dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika Islam. Dalam hal ini pemimpin ideal umat adalah intelektual yang tercerahkan (*Raushanfikr*).

1. Kontribusi Raushanfikr dalam Revolusi Islam Iran

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa menurut Syari'ati satu-satunya pemimpin yang harus memulai langkah-langkah dan memprakarsai gerakan revolusioner untuk mengubah sejarah dan menciptakan sejarah baru adalah *raushanfikr*. Ia adalah model manusia yang diidealkan oleh Syari'ati untuk memimpin masyarakat menuju revolusi. Merekalah yang mendorong terwujudnya perubahan-perubahan struktural yang mendasar, menciptakan semboyan-semboyan baru, memproyeksikan pandangan baru, memulai gerakan baru, dan melahirkan energi dalam jantung kesadaran masyarakatnya.

meskipun Ayatollah Khomeini dan Murtadha Mutahhari dikategorikan sebagai kelompok ulama, menurut hemat penulis kedua tokoh ini juga sangat relevan disebut juga sebagai seorang *raushanfiker*. Meskipun gagasan *raushanfiker* pada lazimnya untuk membedakannya dengan ulama. Tapi kata Syari'ati, *Raushanfiker* bukan hanya berasal dari cendekiawan umum, melainkan juga dapat berasal dari ulama. Ulama ideal dalam pandangannya, secara sederhana adalah ulama aktivis, yang menggalang massa untuk melakukan gerakan protes. Khomeini dan Muthahhari, tentu saja cocok dengan kerangka Syari'ati mengenai ulama. Maka, Selama ulama tadi berada dalam definisi *raushanfiker*, ia dapat dikategorikan sebagai *raushanfiker*.

Oleh karena itu, dalam konteks ini penulis akan mencoba untuk menganalisa peranan tokoh-tokoh tersebut dalam revolusi Islam Iran guna menentukan secara riil sampai sejauh mana pengaruh seorang *raushanfiker* dalam revolusi Islam Iran. Dalam hal ini penulis akan membatasi analisa hanya kepada dua tokoh yakni Ali Syari'ati dan Ayatollah Khomeini. Pembatasan pada dua tokoh tersebut dirasa cukup, karena mewakili dua kelompok. Syari'ati dalam hal ini mewakili kelompok intelektual dan Ayatollah Khomeini mewakili golongan ulama.

Ali Syari'ati tentu saja tokoh yang menurut hemat penulis paling pas dikategorikan sebagai *raushanfiker*. Ketokohnya dilambangkan dengan berapi-apinya pidato dan berderet-deret karya tulisan yang menggugah semangat, telah membuktikan bahwa dirinya adalah cermin seorang *Raushanfiker*, sosok manusia

revolusi. Pada 1962-1963, Ayatullah Khomeini tampil sebagai suara anti-pemerintah di antara minoritas ulama vokal yang menganggap Islam dan Iran tengah terancam bahaya dan kekuasaan mereka melemah, dan yang mendukung keterlibatan politik kaum ulama.. Dari mimbarnya di Qum, Khomeini menjadi suara oposisi yang tidak mengenal kompromi melawan kekuasaan mutlak dan “pemerintahan” atau pengaruh asing.²⁸

Bentrokan-bentrokan yang terjadi di Qum (22 Maret 1963) dan Mashad (3 Juni 1963) menyebabkan Khomeini ditahan pada 4 Juni 1963. Khomeini diasingkan ke Turki pada 1964, lalu pindah ke Irak pada 1965 dan kemudian ke Prancis pada 1968. dari pengasingannya dia terus mengajar, menulis –misalnya *Hokumât-i Islami*²⁹ dan berbicara lantang menentang Syah dan mengutuk kebijakan-kebijakannya yang “tidak Islami”. Ideologi Islamnya bersifat holistik, menampilkan Islam sebagai sebuah jalan hidup yang menyeluruh dan sempurna, yang dapat memberi tuntunan dalam kehidupan sosial politik. Dalam hal ini seruan Khomeini merupakan ungkapan pertanggung jawaban ulama yang paling radikal.

Imam Khomenei terus memompa semangat perlawanan di tempat pengasingannya di Paris. Ia secara rutin mengirim pidato-pidato politik yang

²⁸ Anjar Nugroho, “Revolusi Islam Iran,” dalam <http://www.pemikiranislam.wordpress.com>, (3 Juni 2010)

²⁹ Dalam buku tersebut, dengan berhujjah dengan prinsip-prinsip dasar jihad dan *amar ma'ruf*, Khomeini berdalih bahwa ulama wajib memberontak pemerintahan despotik. Ia menegaskan, bahwa kerajaan merupakan institusi kenegaraan non-Islami dan menyerukan reformasi masyarakat politik secara total yang mana ulama haruslah terlibat langsung dan terlibat aktif di dalamnya. Lihat Ira. M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Raja Grafindi Persada, Cet. I, 1999), h. 588

kebodohan dan ketertindasan. Maka kepada para agamawan/ Islamolog sudah sudah selayaknya melakukan ijtihad yang sesungguhnya. Jika agama hanya bisa mengurus hal-hal ritual maka pada hakekatnya agama telah mati.

2. Pemikiran radikal revolusioner Ali Syari'ati adalah salah satu contoh jenis pemikiran yang dapat direkonstruksi dan direaktualisasi kembali dalam konteks kesejarahan yang berbeda. Upaya itu dimaksudkan untuk melahirkan teori-teori sosial-politik yang kritis sekaligus religius yang dapat diimplementasikan sebagai teori revolusi sosial menuju struktur masyarakat lebih berkeadilan dan tanpa penindasan.
3. Kepada para intelektual Islam supaya dapat menjadikan Islam revolusioner sebagai basis pergerakan sosio-politiknya. Urgensi upaya ini adalah menjadikan mereka yang tertindas, teraniaya, yang diliputi rasa ketidakadilan dan kesewenang sebagai pihak yang harus dibela.

Akan tetapi sejauh mana efektifitas gagasan- gagasan Syari'ati masih butuh penelitian lebih lanjut. Mengingat karya ilmiah ini masih banyak kelemahan. Apa yang peneliti lakukan hanyalah secuil upaya. Akhirnya kajian seperti ini perlu ada upaya-upaya lain dan terus dikembangkan yang lebih serius dan bersungguh-sungguh, dengan harapan kajian seperti ini akan menambah khazanah pemikiran Islam dan menginspirasi pemikir muda yang akan datang.

